

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
MATA KULIAH : KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG AGAMA
PROGRAM STUDI STUDI AGAMA-AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

A IDENTITAS

1	Prodi	Studi Agama-Agama
2	Kode Mata kuliah	2032SAA052
3	Nama Mata kuliah	Kebijakan Pemerintah tentang Agama
4	Semester/SKS	5 / 2 sks
5	Jenis Mata Kuliah	MKK
6	Koordinator Mata Kuliah	2010037601 Muqni Affan Abdullah, Lc., M.A.
7	Dosen Pengampu	Muqni Affan Abdullah, Lc., M.A.

B CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL-Prodi)

- 1 Sikap
 - a Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - b Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - c Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- 2 Pengetahuan
 - a Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi;
 - b Menguasai pengetahuan tentang agama dan keberagaman masyarakat terkait konsep-konsep moderasi dan kerukunan dalam Studi Agama dan ajaran Islam;
- 3 Keterampilan Umum
 - a Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
 - b Mampu menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja dengan baik dan bijak;
- 4 Keterampilan Khusus
 - a Mampu menghasilkan produk pemikiran keagamaan yang toleran dan moderat dalam konteks kehidupan keagamaan, kebangsaan dan kenegaraan;
 - b Mampu melakukan fasilitasi, mediasi dan resolusi terkait dengan konflik sosial keagamaan dalam kehidupan masyarakat multi agama dan multi kultural;
 - c Mampu mengaktualisasikan nilai-nilai agama yang dapat dikontribusikan bagi perdamaian kehidupan masyarakat multi agama dan multi kultural;

C CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

- 1 Mampu menjelaskan peran dan fungsi penciptaan manusia dalam kehidupan sosial
- 2 Mampu menjelaskan kontribusi setiap semua agama dalam menciptakan peradaban dunia
- 3 Mampu mengambil keputusan disetiap problem keagamaan
- 4 Mampu melindungi setiap pemeluk agama agar tidak terjadi gesekan konflik
- 5 Mampu menghargai dan mengayomi sesama umat beragama

D DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah Kebijakan Pemerintah Tentang Agama memberikan pemahaman kepada mahasiswa berkaitan dengan esensi paradigma Ilmu Politik yang mengedepankan proses dan output dari aktivitas politik sebagai seni dan ilmu. Mata kuliah ini merupakan kajian interdisipliner dari Ilmu Politik dan Ilmu Sosial lainnya. Kebijakan merupakan kebutuhan mendasar dalam organisasi pemerintahan modern terutama yang berhubungan dengan "Government Performance". Konsep Kebijakan Publik Ideal/klasik dengan dominasi peran aktor pelaku dan sasaran kebijakan sampai dengan lingkunan kelembagaan internal dan eksternal lain dalam kerangka "cause and effect". Pada perkuliahan ini akan dibahas tentang proses dan jenis formal, jaringan kebijakan dan pengaruh-pengaruh dominan terhadap kualitas kebijakan. Kajian mata kuliah Kebijakan Publik ini akan meliputi kajian utama, yang terdiri dari: Kebijakan Publik Birokrasi sebagai konsep, means dan instrument sistem politik, institusi serta perilaku aktor dan sasaran kebijakan. Selanjutnya dikomparasikan dengan kajian empiris dari Kebijakan Publik di ideografis Indonesia.

E MATRIKS KEGIATAN PEMBELAJARAN

NO	Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub CPMK)	Bahan Kajian/Materi Perkuliahan	Bentuk Pembelajaran			Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian (kriteria, indikator dan bobot)	Referensi
			Luring	Daring	Blanded					
1	Pengantar	Orientasi Perkuliahan	X			1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya jawab	PTM 2 x 50 Menit, TKT 2 x 60 Menit, TKM 2 x 60 Menit	1. Kerja sama 2. Berpikir kritis 3. Kreatif 4. Komunikasi 5. Berargumentasi	1. Keaktifan dalam merespon 2. Tanya jawab	1. Buku panduan 2. RPS
2	KPTA	1. Pengertian Kebijakan Pemerintah. 2. Objek kajian Kebijakan Pemerintah. 3. Tujuan mempelajari Kebijakan Pemerintah. 4. Posisi kajian Kebijakan Pemerintah Terhadap Agama	X			1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya jawab	PTM 2 x 50 Menit, TKT 2 x 60 Menit, TKM 2 x 60 Menit	1. Kerja sama 2. Berpikir kritis 3. Kreatif 4. Komunikasi 5. Berargumentasi	1. Keaktifan dalam merespon 2. Tanya jawab	1. Jones, C.O., 1984., An Introdcution to the Study of Public Policy, Brooks/Cole, The USA 2. Blondel, J. 1995. Comparative Government. An Introduction. Great Britain: Prentice Hall Harvester Wheatsheaf.
3	KPTA	1. Undang-undang Kebijakan Pemerintah tentang agama. 2. Ajaran-ajaran dalam landasan hukum Kementerian Agama.	X			1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya jawab	PTM 2 x 50 Menit, TKT 2 x 60 Menit, TKM 2 x 60 Menit	1. Kerja sama 2. Berpikir kritis 3. Kreatif 4. Komunikasi 5. Berargumentasi	1. Keaktifan dalam merespon 2. Tanya jawab	1. Islamy, M.I, 191992, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara 2. Peraturan Menteri Agama RI
4	KPTA	1. Tugas dan fungsi Kementerian Agama. 2. Problem di balik tugas dan fungsi Kementerian agama.	X			1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya jawab	PTM 2 x 50 Menit, TKT 2 x 60 Menit, TKM 2 x 60 Menit	1. Kerja sama 2. Berpikir kritis 3. Kreatif 4. Komunikasi 5. Berargumentasi	1. Keaktifan dalam merespon 2. Tanya jawab	Islamy, M.I, 191992, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara
5	KUB	1. Proses kemunculan FKUB, fungsi, dan perannya dalam masalah kerukunan umat beragama. 2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat kerja FKUB di Indonesia	X			1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya jawab	PTM 2 x 50 Menit, TKT 2 x 60 Menit, TKM 2 x 60 Menit	1. Kerja sama 2. Berpikir kritis 3. Kreatif 4. Komunikasi 5. Berargumentasi	1. Keaktifan dalam merespon 2. Tanya jawab	1. Tim Puslitbang Kehidupan Beragama, Kompilasi Kebijakan Dan PeraturanPerundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama (Jakarta, Puslitbang, 2008) 2. Depag RI, Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama Di Indonesia, (Jakarta; Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, 1997)

NO	Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub CPMK)	Bahan Kajian/Materi Perkuliahan	Bentuk Pembelajaran			Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian (kriteria, indikator dan bobot)	Referensi
			Luring	Daring	Blanded					
6	Konsep dan tupoksi kerja pemerintah terhadap agama.	1. Konsep mitra pemerintah Indonesia dengan KUB. 2. Bentuk-bentuk mitra kerja dan hambatan-hambatannya.	X			1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya jawab	PTM 2 x 50 Menit, TKT 2 x 60 Menit, TKM 2 x 60 Menit	1. Kerja sama 2. Berpikir kritis 3. Kreatif 4. Komunikasi 5. Berargumentasi	1. Keaktifan dalam merespon 2. Tanya jawab	1. Rodee, Carlton Clymer, dkk. 1988. Pengantar Ilmu Politik. Jakarta: Rajawali Pers. 2. Said, M. Mas`ud. 1997. State of The Art Ilmu Politik Dan Pemerintahan. Malang: Cahaya Press.
7	Upaya Pemerintah dalam menjaga kelompok umat beragama dalam konteks kelslaman dan kelIndonesiaan.	1. Makna KUB dalam konteks Kelslaman 2. Makna KUB dalam konteks KelIndonesiaan.	X			1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya jawab	PTM 2 x 50 Menit, TKT 2 x 60 Menit, TKM 2 x 60 Menit	1. Kerja sama 2. Berpikir kritis 3. Kreatif 4. Komunikasi 5. Berargumentasi	1. Keaktifan dalam merespon 2. Tanya jawab	1. Tim Puslitbang Kehidupan Beragama, Kompilasi Kebijakan Dan PeraturanPerundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama (Jakarta, Puslitbang, 2008) 2. Depag RI, Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama Di Indonesia, (Jakarta; Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, 1997)
8	UTS	UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)	X			1. Ujian Tulis 2. Ujian Lisan 3. Opsional	PTM 2 x 50 Menit, TKT 2 x 60 Menit, TKM 2 x 60 Menit	Diharapkan mampu menjawab dan mengevaluasi dari setiap materi yang diberikan	Berdasarkan hasil yang di ujikan, baik berupa tulisan maupun lisan	
9	Modernisasi	1. Relasi minoritas non-muslim di wilayah mayoritas muslim. 2. Pengaruh syariat Islam di Aceh bagi non-muslim.	X			1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya jawab	PTM 2 x 50 Menit, TKT 2 x 60 Menit, TKM 2 x 60 Menit	1. Kerja sama 2. Berpikir kritis 3. Kreatif 4. Komunikasi 5. Berargumentasi	1. Keaktifan dalam merespon 2. Merespon 3. Tanya jawab	1. Abubakar, Alyasa. 2008. Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Prov. Aceh. 2. Dinas Syariat Islam. 2009. Himpunan Undang-Undang, keutusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Prov. Aceh.

NO	Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub CPMK)	Bahan Kajian/Materi Perkuliahan	Bentuk Pembelajaran			Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian (kriteria, indikator dan bobot)	Referensi
			Luring	Daring	Blanded					
10	Hambatan pemerintah terhadap KPTA	1. Bentuk-bentuk hambatan pemerintah dalam menanggapi aliran agama di Aceh. 2. Strategi strategi pemerintah dalam menyikapi aliran agama di Aceh.	X			1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya jawab	PTM 2 x 50 Menit, TKT 2 x 60 Menit , TKM 2 x 60 Menit	1. Kerja sama 2. Berpikir kritis 3. Kreatif 4. Komunikasi 5. Berargumentasi	1. Keaktifan dalam 2. Merespon 3. Tanya jawab	1. Abubakar, Alyasa. 2008. Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Prov. Aceh. 2. Dinas Syariat Islam. 2009. Himpunan Undang-Undang, keutusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Prov. Aceh.
11	KUB berbasis kearifan lokal Aceh.	Kebijakan Pemerintah Aceh dalam qanun Aceh.	X			1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya jawab	PTM 2 x 50 Menit, TKT 2 x 60 Menit , TKM 2 x 60 Menit	1. Kerja sama 2. Berpikir kritis 3. Kreatif 4. Komunikasi 5. Berargumentasi	1. Keaktifan dalam 2. Merespon 3. Tanya jawab	1. Depag RI, Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama Di Indonesia, (Jakarta; Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, 1997) 2. Abubakar, Alyasa. 2008. Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Prov. Aceh. 3. Dinas Syariat Islam. 2009. Himpunan Undang-Undang, keutusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Prov. Aceh.

NO	Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub CPMK)	Bahan Kajian/Materi Perkuliahan	Bentuk Pembelajaran			Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian (kriteria, indikator dan bobot)	Referensi
			Luring	Daring	Blanded					
12	Problem rumah ibadah di Aceh Singkil.	Kronologis konflik rumah ibadah dan rekonsiliasi konflik oleh pemerintah.	X			1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya jawab	PTM 2 x 50 Menit, TKT 2 x 60 Menit, TKM 2 x 60 Menit	1. Kerja sama 2. Berpikir kritis 3. Kreatif 4. Komunikasi 5. Berargumentasi	1. Keaktifan dalam 2. Merespon 3. Tanya jawab	1. Depag RI, Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama Di Indonesia, (Jakarta; Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, 1997) 2. Abubakar, Alyasa. 2008. Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Prov. Aceh. 3. Dinas Syariat Islam. 2009. Himpunan Undang-Undang, keutusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Prov. Aceh.
13	Aspek - aspek Kebijakan Pemerintah terhadap Agama	Problem dan Strategi dalam Mengambil Suatu Keputusan terhadap Agama.	X			1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya jawab	PTM 2 x 50 Menit, TKT 2 x 60 Menit, TKM 2 x 60 Menit	1. Kerja sama 2. Berpikir kritis 3. Kreatif 4. Komunikasi 5. Berargumentasi	1. Keaktifan dalam 2. Merespon 3. Tanya jawab	1. Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 2. Abubakar, Alyasa. 2008. Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Prov. Aceh
14	Kebijakan Pemerintah dalam Agama dalam masa pandemi covid-19.	Pro kontra Kebijakan Pemerintah dalam Agama dalam masa pandemi covid-19.	X			1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya jawab	PTM 2 x 50 Menit, TKT 2 x 60 Menit, TKM 2 x 60 Menit	1. Kerja sama 2. Berpikir kritis 3. Kreatif 4. Komunikasi 5. Berargumentasi	1. Keaktifan dalam 2. Merespon 3. Tanya jawab	1. Abubakar, Alyasa. 2008. Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Prov. Aceh. 2. Dinas Syariat Islam. 2009. Himpunan Undang-Undang, keutusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Prov. Aceh

NO	Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub CPMK)	Bahan Kajian/Materi Perkuliahan	Bentuk Pembelajaran			Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian (kriteria, indikator dan bobot)	Referensi
			Luring	Daring	Blanded					
15	Moderasi Beragama dan Kebijakan pemerintah terhadap suatu problem	1. Pro Kontra umat Islam dengan Pemerintah dalam permasalahan Pembatalan Haji pada Tahun 1442/2021. 2. Moderasi Beragama	X			1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya jawab	PTM 2 x 50 Menit, TKT 2 x 60 Menit, TKM 2 x 60 Menit	1. Kerja sama 2. Berpikir kritis 3. Kreatif 4. Komunikasi 5. Berargumentasi	1. Keaktifan dalam 2. Merespon 3. Tanya jawab	1. Qasim, Muhammad. (2020). Membangun Moderasi Beragama Umat melalui Integrasi Keilmuan. Alauddin University Press 2. Kementerian Agama RI. (2019). Tanya Jawab Moderasi Beragama (1st ed.). Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
16	UAS	UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)	X			1. Ujian Tulis 2. Ujian Lisan 3. Opsional	PTM 2 x 50 Menit, TKT 2 x 60 Menit, TKM 2 x 60 Menit	Diharapkan mampu menjawab dan mengevaluasi dari setiap materi yang diberikan	Berdasarkan hasil yang di ujikan, baik berupa tulisan maupun lisan	
17										
18										
19										
20										

F REFERENSI

1 Wajib

- Blondel, J. 1995. Comparative Government. An Introduction. Great Britain: Prentice Hall Harvester Wheatsheaf.
- Jones, C.O., 1984., An Introdcution to the Study of Public Policy, Brooks/Cole, The USA
- Kementerian Agama RI. (2019). Tanya Jawab Moderasi Beragama (1st ed.). Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- Qasim, Muhammad. (2020). Membangun Moderasi Beragama Umat melalui Integrasi Keilmuan. Alauddin University Press
- Abubakar, Alyasa. 2008. Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Prov. Aceh.
- Dinas Syariat Islam. 2009. Himpunan Undang-Undang, keutusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Prov. Aceh

2 Pendukung

- Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Said, M. Mas`ud. 1997. State of The Art Ilmu Politik Dan Pemerintahan. Malang: Cahaya Press.
- Rodee, Carlton Clymer, dkk. 1988. Pengantar Ilmu Politik. Jakarta: Rajawali Pers.
- Depag RI, Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama Di Indonesia, (Jakarta; Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, 1997)
- Tim Puslitbang Kehidupan Beragama, Kompilasi Kebijakan Dan PeraturanPerundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama (Jakarta, Puslitbang, 2008)

Mengetahui:
Ketua Prodi Studi Agama-Agama

Banda Aceh, 18 Agustus 2023
Koordinator/Dosen Mata Kuliah

Dr. Fuad, S.Ag., M.Hum.
NIDN : 2015036902

Muqni Affan Abdullah, Lc., M.A.
NIDN : 2010037601

TUGAS KEGIATAN TERSTRUKTUR (TKT)

Nama Mata Kuliah Kebijakan Pemerintah tentang Agama

Kode mata Kuliah 2032SAA052

Semester/SKS 5/2 sks

1 Tujuan Tugas Mahasiswa mampu menguasai secara teoritis maupun praktis terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Agama dan mengimplementasikan terkait ilmu yang berbicara mengenai atas Kebijakan Pemerintah, Posisi kajian Kebijakan Pemerintah Terhadap Agama, Undang-undang Kebijakan Pemerintah tentang agama, Ajaran-ajaran dalam landasan hukum Kementerian Agama, Tugas dan fungsi Kementerian Agama, Problem di balik tugas dan fungsi Kementerian agama, Proses kemunculan FKUB, fungsi, dan perannya dalam masalah kerukunan umat beragama, Faktor-faktor pendukung dan penghambat kerja FKUB di Indonesia, Konsep dan tupoksi kerja pemerintah terhadap agama, Konsep mitra pemerintah Indonesia dengan KUB, Upaya Pemerintah dalam menjaga kelompok umat beragama dalam konteks kelslaman dan keIndonesiaan, Modernisasi, Hambatan pemerintah terhadap KPTA, KUB berbasis kearifan lokal Aceh, Problem rumah ibadah di Aceh Singkil, Kronologis konflik rumah ibadah dan rekonsiliasi konflik oleh pemerintah, Aspek - aspek Kebijakan Pemerintah terhadap Agama, Kebijakan Pemerintah dalam Agama dalam masa pandemi covid-19 dan Moderasi Beragama dan Kebijakan pemerintah terhadap suatu problem

2 Uraian Tugas

- | | |
|---|---|
| a Obyek garapan | Materi perkuliahan yang terdapat dalam RPS |
| b Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan | Membuat ringkasan Materi perkuliahan |
| c Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan | Melakukan content analysis terhadap keterkaitan materi ajar yang dipelajari |
| d Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan | Laporan Kegiatan dan hasil analisis terhadap Materi Perkuliahan |

3 Kriteria Penilaian

- | | |
|------------------------------------|-----|
| a Ketepatan penyerahan tugas | 15% |
| b Kesempurnaan substansi/isi tugas | 60% |
| c Desain tugas | 25% |

Mengetahui:
Ketua Prodi Studi Agama-Agama

Banda Aceh, 18 Agustus 2023
Koordinator/Dosen Mata Kuliah

Dr. Fuad, S.Ag., M.Hum.
NIDN : 2015036902

Muqni Affan Abdullah, Lc., M.A.
NIDN : 2010037601

TUGAS KEGIATAN MANDIRI (TKM)

Nama Mata Kuliah	Kebijakan Pemerintah tentang Agama
Kode mata Kuliah	2032SAA052
Semester/SKS	5/2 sks

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

- 1 Mampu menjelaskan peran dan fungsi penciptaan manusia dalam kehidupan sosial
- 2 Mampu menjelaskan kontribusi setiap semua agama dalam menciptakan peradaban dunia
- 3 Mampu mengambil keputusan disetiap problem keagamaan
- 4 Mampu melindungi setiap pemeluk agama agar tidak terjadi gesekan konflik
- 5 Mampu menghargai dan mengayomi sesama umat beragama

Jenis Tugas :

1. Tugas Kelompok / Makalah
2. Paper (Individu)
3. Membuat kertas kerja ilmiah (makalah, skripsi, thesis, dan sebagainya)

Mengetahui:
Ketua Prodi Studi Agama-Agama

Dr. Fuad, S.Ag., M.Hum.
NIDN : 2015036902

Banda Aceh, 18 Agustus 2023
Koordinator/Dosen Mata Kuliah

Muqni Affan Abdullah, Lc., M.A.
NIDN : 2010037601

PENILAIAN SIKAP, PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN

A. PENILAIAN SIKAP (RUBRIK)

Prediket	Skor Angka	Deskripsi Perilaku
Diisi dengan deskripsi tingkatan nilai, dengan jumlah tingkat yang rinciannya sesuai dengan yang dikehendaki (Sangat Baik Sekali, Sangat Baik, Baik, Agak Baik, Cukup, Agak Kurang Baik, Kurang Baik, Sangat Kurang Baik dan Gagal)	Diisi dengan rentang angka yang sesuai dengan tingkat nilai pada kolom jenjang.	Dapat Dipercaya, Menghargai orang Lain, Tanggung Jawab Secara Individu, Tanggung Jawab Secara Sosial, Apakah Anda seorang yang Adil, Apakah Anda Orang yang Peduli dan Diskusi Kelompok/Kelas

Keterangan :

Prediket :

Diisi dengan deskripsi tingkatan nilai, dengan jumlah tingkat yang rinciannya sesuai dengan yang dikehendaki (sangat baik, baik, cukup, kurang, gagal).

Skor Angka :

Diisi dengan rentang angka yang sesuai dengan tingkat nilai pada kolom jenjang.

B. KRITERIA PENILAIAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN

Nilai Huruf (NH)	Nilai Bobot (NB)	Nilai Angka (NA)	Predikat
A	4.00	90-100	Sangat Baik Sekali
A-	3.67	85-89	Sangat Baik
B+	3.33	78-84	Baik
B	3.00	72-77	Agak Baik
B-	2.67	68-71	Cukup
C+	2.33	65-67	Agak Kurang Baik
C	2.00	60-64	Kurang Baik
D	1.00	50-59	Sangat Kurang Baik
E	0	0-49	Gagal

Mengetahui:
Ketua Prodi Studi Agama-Agama

Banda Aceh, 18 Agustus 2023
Koordinator/Dosen Mata Kuliah

Dr. Fuad, S.Ag., M.Hum.
NIDN : 2015036902

Muqni Affan Abdullah, Lc., M.A.
NIDN : 2010037601